Jurnal Keislaman

p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293
Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Tata Kelola untuk Pencegahan Perundungan Studi Kasus di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung

Yahya Husein Al Azhari[1]
Pascasarjana Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia[1]
yahyahusein300@gmail.com[1]

Suripto[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tululungagung, Indonesia[2]
suripto@staimta.ac.id[2]

Benny Prasetya[3]
Pascasarjana Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia[3]
prasetiyabenny@gmail.com[3]

DOI:
https://doi.org/10.54298/jk.v9i2.1199

Abstrak

Pencegahan perundungan di Pondok Pesantren membutuhkan lebih dari sekadar intervensi perilaku individu karena sangat terkait dengan aturan institusional, pengawasan, hubungan organisasi, dan norma budaya yang mengatur kehidupan hunian. Studi ini meneliti bagaimana mekanisme tata kelola diterapkan oleh pelaku institusi untuk mencegah perundungan dan mengidentifikasi kondisi institusional, budaya, dan struktural yang memfasilitasi atau membatasi pelaksanaannya di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Tulungagung, Indonesia. Desain studi kasus kualitatif digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang semi-terstruktur, pengamatan kehidupan asrama dan aktivitas sehari-hari siswa, diskusi kelompok fokus, serta analisis dokumen kebijakan institusional yang melibatkan pemimpin pesantren, personel urusan mahasiswa dan konseling, musyrif, asatidz, dan siswa dari berbagai tingkat pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa pencegahan perundungan tidak diorganisir sebagai program mandiri tetapi tertanam dalam tata kelola institusional sehari-hari melalui regulasi siswa, pengawasan asrama, bimbingan pribadi, konseling, koordinasi institusional, partisipasi teman sebaya, dan penanganan kasus responsif. Pencegahan didukung oleh kepemimpinan moral yang kuat, hubungan erat antara musyrif–siswa, internalisasi adab, dan budaya musyawarah. Namun, pelaksanaan dibatasi oleh kapasitas pengawasan yang terbatas, ketergantungan pada pengasuh individu, ketiadaan kebijakan anti-perundungan yang eksplisit dan terintegrasi, jalur pelaporan informal, normalisasi perilaku berbahaya sebagai lelucon atau senioritas, dan kekhawatiran siswa tentang konsekuensi sosial dari pelaporan. Temuan ini menunjukkan bentuk tata kelola hibrida di mana mekanisme institusional formal berinteraksi dengan praktik relasional, budaya, dan keagamaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pencegahan perundungan yang berkelanjutan di Pondok Pesantren membutuhkan institusionalisasi prosedural yang lebih kuat sambil mempertahankan sumber daya relasional dan budaya yang tertanam dalam tata kelola pesantren.

***Kata kunci**: pencegahan perundungan; tata kelola; Pondok Pesantren; pesantren; tata kelola relasional; tata kelola hibrida*

Pendahuluan

Pencegahan perundungan semakin dipahami sebagai tantangan tata kelola institusional karena pencegahan berkelanjutan bergantung pada aturan yang koheren, kepemimpinan, pengaturan pelaporan, kemampuan staf, dan iklim sekolah yang mendukung.[1] Bukti meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi anti-perundungan berbasis sekolah mengurangi pelaku dan viktimisasi, meskipun variasi hasil menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan penting.[2] Program yang efektif beroperasi di seluruh kebijakan, kelas, guru, teman sebaya, orang tua, dan siswa individu, membutuhkan tindakan terkoordinasi daripada hukuman terpisah.[3] Bukti longitudinal lebih lanjut mengidentifikasi kepemimpinan yang berkomitmen, struktur organisasi, sumber daya, kompetensi staf, dan penerjemahan kebijakan lokal sebagai pendorong pencegahan berkelanjutan.[4] Kebijakan anti-perundungan saja tidak cukup ketika pelatihan staf, kejelasan peran, dan intervensi yang konsisten lemah.[5]

Bukti internasional dari pendidikan asrama memperkuat pentingnya tata kelola karena kehidupan akademik, sosial, dan pribadi siswa terkonsentrasi dalam satu institusi.[6] Di Amerika Serikat, perundungan di seluruh sekolah di antara siswa asrama dikaitkan dengan tingkat keamanan emosional dan fisik yang lebih rendah, sementara dukungan kesehatan mental sekolah menutupi beberapa asosiasi yang merugikan.[7] Di Tiongkok, status asrama diidentifikasi sebagai faktor risiko keterlibatan perundungan, dan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa rasa memiliki dan ketahanan di sekolah sebagian memediasi masalah kesehatan mental terkait perundungan di antara siswa asrama.[8] Bukti dari India

---

[1] T E Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan," *Jurnal Eropa untuk Psikologi Perkembangan* 18, no. 6 (2021): 880–95, https://doi.org/10.1080/17405629.2021.1889503; N Pearce et al., "'Ini Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan," *Jurnal Internasional Pencegahan Perundungan* 6 (2024): 53–68, https://doi.org/10.1007/s42380-022-00138-6.

[2] David Fraguas et al., "Penilaian Intervensi Anti-Perundungan di Sekolah: Meta-Analisis Uji Klinis Acak," *JAMA Pediatri* 175, no. 1 (2021): 44–55, https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.3541; H Gaffney, M M Ttofi, dan D P Farrington, "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif," *Jurnal Psikologi Sekolah* 85 (2021): 37–56, https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.12.002.

[3] Gaffney, Ttofi, dan Farrington, "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif."

[4] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."

[5] Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan."

[6] Sarah S Fredrick et al., "Persepsi tentang Keselamatan Emosional dan Fisik di antara Siswa Asrama dan Asosiasi dengan Perundungan di Sekolah," *Tinjauan Psikologi Sekolah* 50, no. 2–3 (2021): 441–53, https://doi.org/10.1080/2372966X.2021.1873705; E Wihlborg dan M Spante, "Untuk Kesenangan TI – Dalam Pencarian Program Pelatihan Digitalisasi untuk Pemimpin di Sekolah dan Pra-Sekolah di Swedia," dalam *Catatan Kuliah dalam Ilmu Komputer*, ed. M R Johannessen et al., vol. 14891 LNCS (Linköpings Universitet, Departemen Manajemen dan Teknik, Linköping, Swedia: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024), 83–98, https://doi.org/10.1007/978-3-031-70804-6_6.

[7] Fredrick et al., "Persepsi tentang Keselamatan Emosional dan Fisik di antara Siswa Asrama dan Asosiasi dengan Perundungan di Sekolah."

[8] Q Da et al., "Apakah Prevalensi Perundungan Sekolah Tradisional Meningkat Setelah COVID-19? Bukti dari Studi Dua Tahap Penampang Lintas-Tahap sebelum dan selama Pandemi COVID-19," *Kekerasan & Penelantaran Anak* 143 (2023): 106256, https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106256; X Liu et al., "Dampak Perundungan di Sekolah terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Menengah Asrama: Peran Meditasi dari Kebersamaan dan

menunjukkan bahwa perundungan dibentuk oleh kondisi sosial dan budaya yang spesifik kontekstualnya.[9] Di Indonesia, perbedaan remaja antara bercanda dan perundungan serius menunjukkan bagaimana norma lokal teman sebaya dan gender memengaruhi pengenalan perilaku berbahaya.[10] Secara kolektif, studi-studi ini lebih berfokus pada risiko, keselamatan, hasil psikososial, atau efek intervensi daripada pada proses tata kelola institusional.[11]

Kesenjangan riset yang kritis adalah bagaimana niat anti-perundungan diterjemahkan ke dalam tata kelola rutin di Pondok Pesantren yang khas budaya.[12] Penelitian yang berorientasi tata kelola sebagian besar meneliti sekolah arus utama, sedangkan studi Pondok Pesantren menekankan paparan, keselamatan, rasa memiliki, dan konsekuensi kesehatan mental.[13] Studi kebijakan juga menunjukkan bahwa aturan formal tidak menjamin intervensi, namun perhatian terbatas diberikan pada bagaimana tanggung jawab, jalur pelaporan, pengawasan, dan respons dikoordinasikan dalam kehidupan asrama sehari-hari.[14] Selain itu, studi Q1/Q2 yang ditinjau di sini dari India dan Indonesia menonjolkan norma lokal tetapi tidak menjelaskan bagaimana otoritas agama, senioritas, kehidupan komunal, pendidikan moral, dan perawatan informal berinteraksi dengan tata kelola formal di Pondok Pesantren.[15] Akibatnya, hubungan antara harapan tertulis dan praktik institusional yang dijalani masih kurang diteliti dalam konteks pesantren.

Studi ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan memperlakukan pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i sebagai proses tata kelola institusional yang melibatkan aturan, aktor, hubungan, dan kondisi pelaksanaan.[16] Tata kelola dioperasionalkan melalui aturan kelembagaan, tanggung jawab aktor, pengawasan sehari-hari, jalur pelaporan, koordinasi, respons insiden, dan kondisi organisasi yang menopang atau melemahkan pencegahan. Kontribusi baru pertama adalah menggeser analisis dari pelaku dan korban individu ke pengaturan kelembagaan yang membentuk pencegahan dan respons.[17] Yang

---

Ketahanan Sekolah," *Psikiatri Anak dan Remaja serta Kesehatan Mental* 19 (2025), https://doi.org/10.1186/s13034-025-00887-4.

[9] N Thakkar, M van Geel, dan P Vedder, "Tinjauan Sistematis tentang Perundungan dan Viktimisasi di Kalangan Remaja di India," *Jurnal Internasional Pencegahan Perundungan* 3 (2021): 253–69, https://doi.org/10.1007/s42380-020-00081-4.

[10] Sarah L Fine et al., "'Jika Benar-benar Berlebihan, Bisa Masuk ke Hati Anda': Investigasi Metode Campuran tentang Perundungan di Kalangan Remaja Dini di Semarang, Indonesia," *Jurnal Kekerasan Interpersonal* 38, no. 3–4 (2023): 4088–4113, https://doi.org/10.1177/08862605221111422.

[11] Fine et al.; Liu et al., "Dampak Perundungan di Sekolah terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Menengah Asrama: Peran Meditasi Kebersamaan dan Ketahanan di Sekolah."

[12] Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan."

[13] Fredrick et al., "Persepsi tentang Keselamatan Emosional dan Fisik di antara Siswa Asrama dan Asosiasi dengan Perundungan di Sekolah."

[14] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."

[15] Thakkar, van Geel, dan Vedder, "Tinjauan Sistematis tentang Perundungan dan Viktimisasi di Kalangan Remaja di India."

[16] Gaffney, Ttofi, dan Farrington, "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif."

[17] Gaffney, Ttofi, dan Farrington.

kedua adalah mengintegrasikan tata kelola struktural dengan praktik budaya dan relasional yang dapat memperkuat kontrol sosial sekaligus mengaburkan perilaku berbahaya.[18] Yang ketiga adalah mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan dan membatasi dalam lingkungan perumahan Islam yang tetap kurang terwakili dalam bukti internasional yang ditinjau di sini.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana tata kelola pencegahan perundungan dijalankan oleh pelaku institusional di Pondok Pesantren Imam Syafi'i dan mengidentifikasi kondisi yang membentuk pelaksanaan.[19] Alih-alih memperkirakan prevalensi atau menguji program standar, studi ini mengkaji proses kelembagaan, praktik pelaku, makna budaya, dan kapasitas struktural yang dapat menjelaskan variasi dalam praktik pencegahan. Pertanyaan penelitian pertama bertanya: Bagaimana mekanisme tata kelola diimplementasikan oleh pelaku institusi untuk mencegah perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i? Pertanyaan kedua menanyakan: Faktor institusional, budaya, dan struktural apa yang memfasilitasi atau membatasi pencegahan perundungan berbasis tata kelola di Pondok Pesantren Imam Syafi'i? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan untuk menghasilkan gambaran tata kelola yang sensitif konteks yang menginformasikan praktik Pondok Pesantren yang lebih aman dan berkontribusi pada debat internasional tentang pelaksanaan dan pencegahan yang responsif secara budaya.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk meneliti tata kelola pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Tulungagung, Indonesia, dengan fokus pada kebijakan institusional, praktik pencegahan, tanggung jawab aktor, pengawasan, mekanisme pelaporan, dan faktor kontekstual.[20] Peserta dipilih secara sengaja dari pemimpin pesantren, personel urusan mahasiswa dan konseling, musyrif asrama, asatidz, dan mahasiswa, dengan rekrutmen berlanjut hingga data jenuh tercapai.[21] Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, diskusi kelompok fokus, dan analisis dokumen untuk memungkinkan triangulasi antar peserta, praktik, dan regulasi institusional.[22] Pengumpulan data mengikuti proses iteratif, sementara kerahasiaan

[18] Fine et al., "'Jika Benar-benar Berlebihan, Bisa Masuk ke Hati Anda': Penelitian Metode Campuran tentang Perundungan di Remaja Dini di Semarang, Indonesia."

[19] Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan."

[20] L E Tomaszewski, J Zarestky, dan E Gonzalez, "Merencanakan Riset Kualitatif: Desain dan Pengambilan Keputusan untuk Peneliti Baru," *Jurnal Internasional Metode Kualitatif* 19 (2020): 1–7, https://doi.org/10.1177/1609406920967174; Sarah L Dalglish, H Khalid, dan S A McMahon, "Analisis Dokumen dalam Riset Kebijakan Kesehatan: Pendekatan READ," *Kebijakan dan Perencanaan Kesehatan* 35, no. 10 (2020): 1424–31, https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064.

[21] Stephen Campbell et al., "Pengambilan Sampel Tujuan: Kompleks atau Sederhana? Contoh Kasus Riset," *Jurnal Riset Keperawatan* 25, no. 8 (2020): 652–61, https://doi.org/10.1177/1744987120927206; Monique Hennink dan B N Kaiser, "Ukuran Sampel untuk Kejenuhan dalam Penelitian Kualitatif: Tinjauan Sistematis Uji Empiris," *Ilmu Sosial & Kedokteran* 292 (2022): 114523, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523.

[22] Tanya Buys et al., "Sebuah Lens Refleksif tentang Persiapan dan Melakukan Wawancara Semi-Terstruktur dengan Rekan Akademis," *Riset Kesehatan Kualitatif* 32, no. 13 (2022): 2030–39, https://doi.org/10.1177/10497323221130832; M Pinto da Costa, "Melakukan Kelompok Fokus Lintas Budaya,

dijaga melalui kode peserta dan pengecualian informasi identifikasi. [23] Data dianalisis menggunakan analisis tematik refleksif, melibatkan pengenalan, pengkodean, pengembangan tema, penyempurnaan, dan interpretasi. Pengkodean induktif digabungkan dengan kategori berbasis teori untuk mengidentifikasi mekanisme tata kelola serta faktor institusional, budaya, dan struktural yang memengaruhi pencegahan perundungan.[24] Karena studi ini berfokus pada interpretasi kualitatif, tidak ada tes statistik inferensial yang diterapkan.

Hasil Penelitian

Mekanisme Tata Kelola yang Diterapkan oleh Aktor Institusional untuk Mencegah Perundungan

Temuan menunjukkan bahwa pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i diintegrasikan ke dalam tata kelola sehari-hari institusi, bukan melalui program anti-perundungan khusus. Mekanisme pencegahan tertanam dalam regulasi siswa, pengawasan asrama, pendidikan moral, konseling, koordinasi institusi, dan respons terhadap keluhan siswa. Mekanisme ini beroperasi melalui struktur formal dan hubungan informal di komunitas pesantren tersebut.

Dasar regulasi untuk pencegahan perundungan ditetapkan melalui aturan umum yang mengatur perilaku siswa. Regulasi ini melarang tindakan yang menyakiti, menghina, mempermalukan, atau merendahkan orang lain, meskipun perundungan tidak secara eksplisit diidentifikasi sebagai kategori pelanggaran terpisah. Oleh karena itu, perilaku terkait perundungan ditangani melalui ketentuan disipliner yang ada, tergantung pada bagaimana pelaku institusional menafsirkan insiden tertentu. Pengaturan ini memungkinkan institusi merespons perilaku berbahaya dalam kerangka regulasi yang telah ditetapkan, meskipun ketiadaan definisi khusus tentang perundungan dapat menimbulkan perbedaan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan insiden.

Upaya pencegahan dimulai ketika siswa memasuki pesantren melalui kegiatan orientasi, bimbingan disipliner, pengingat rutin, dan instruksi moral. Kegiatan ini bertujuan menetapkan batasan perilaku yang tepat dan menumbuhkan rasa hormat di antara siswa. Internalisasi adab menjadi inti dari pendekatan ini karena siswa didorong untuk memahami interaksi yang menghormati tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan institusional tetapi juga sebagai ekspresi tanggung jawab moral. Sistem titik pelanggaran melengkapi

Multibahasa, dan Multinegara: Panduan untuk Peneliti," *Jurnal Internasional Metode Kualitatif* 20 (2021): 1–6, https://doi.org/10.1177/16094069211049929.

[23] L G Rogers et al., "Beyond the Interview Guide: Pengalaman dalam Menerapkan Pedoman Wawancara Secara Praktis dan Sadar Saat Melakukan Penelitian dengan Anak-anak dan Remaja dengan Kondisi Kronis serta Saudara-saudara Mereka," *Jurnal Internasional Metode Kualitatif* 20 (2021): 1–14, https://doi.org/10.1177/1609406920982148; S A Silverio et al., "Topik Sensitif, Menantang, dan Sulit: Pengalaman dan Pertimbangan Praktis untuk Peneliti Kualitatif," *Jurnal Internasional Metode Kualitatif* 21 (2022): 1–16, https://doi.org/10.1177/16094069221124739.

[24] Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Satu Ukuran untuk Semua? Apa yang Termasuk Praktik Berkualitas dalam Analisis Tematik (Refleksif)?," *Riset Kualitatif dalam Psikologi* 18, No. 3 (2021): 328–52, https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238.

langkah-langkah pencegahan ini dengan menyediakan mekanisme administratif untuk mencatat pelanggaran dan mendukung bimbingan selanjutnya. Namun, efektivitasnya bergantung pada apakah insiden diamati, dilaporkan, dan diakui oleh personel institusi.

Pengawasan asrama harian merupakan mekanisme penting lain untuk pencegahan perundungan. Musyrif memainkan peran sentral karena interaksi mereka yang terus-menerus dengan siswa memungkinkan mereka mengamati hubungan antarpribadi, memantau perubahan perilaku, dan mengidentifikasi potensi masalah. Tanggung jawab mereka melampaui penegakan aturan untuk mencakup komunikasi informal, dukungan emosional, dan intervensi dini ketika tanda-tanda ketegangan atau eksklusi muncul. Pendekatan relasional ini sangat relevan karena perundungan tidak selalu melibatkan agresi fisik. Hal ini dapat terjadi melalui ejekan verbal, julukan merendahkan, eksklusi sosial, tekanan kelompok, gangguan terhadap barang pribadi, dan hubungan yang tidak setara antara siswa senior dan junior.

Identifikasi perundungan menjadi rumit oleh kecenderungan beberapa perilaku berbahaya untuk diartikan sebagai lelucon biasa atau interaksi rutin dengan teman sebaya. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif mengharuskan pelaku institusi membedakan interaksi sosial yang dapat diterima dari perilaku yang menyebabkan kerusakan psikologis atau sosial. Organisasi fisik kehidupan hunian juga memengaruhi efektivitas pengawasan. Kegiatan pendidikan formal umumnya lebih terstruktur dan lebih mudah dipantau, sedangkan ruang asrama dan ruang informal memberikan otonomi lebih besar bagi siswa dan dapat menciptakan peluang bagi interaksi berbahaya yang terjadi di luar pengawasan langsung orang dewasa.

Mekanisme pelaporan terutama beroperasi melalui hubungan pribadi daripada prosedur administratif yang terstandarisasi. Mahasiswa umumnya mendekati musyrif sebagai titik kontak pertama mereka karena aksesibilitas dan kedekatan sehari-hari. Masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui pengawasan rutin asrama dapat dirujuk ke personel konseling atau staf urusan mahasiswa. Pengaturan ini memungkinkan respons yang relatif fleksibel, tetapi ketiadaan jalur pelaporan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai tanggung jawab institusional dan prosedur yang tepat untuk menangani kasus perundungan.

Ketika masalah interpersonal diidentifikasi, pesantren umumnya memprioritaskan bimbingan, dialog, dan koreksi perilaku daripada langsung menjatuhkan sanksi hukuman. Siswa yang bertanggung jawab atas perilaku berbahaya didorong untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Konseling dan bimbingan juga dapat melibatkan siswa yang terdampak insiden untuk memastikan kebutuhan mereka mendapat perhatian dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pendidikan dan moral pesantren, di mana penyelesaian masalah interpersonal dimaksudkan untuk mendorong peningkatan perilaku, kesejahteraan siswa, dan pemulihan hubungan sosial yang sesuai.

Koordinasi institusional juga mendukung pelaksanaan pencegahan perundungan. Kepemimpinan pesantren menetapkan harapan normatif terkait perilaku siswa, sementara musyrif melakukan pengawasan langsung, asatidz memperkuat nilai moral dalam kegiatan pendidikan, personel konseling memberikan bantuan individu, dan staf urusan mahasiswa berpartisipasi dalam penanganan kasus yang memerlukan keterlibatan institusional yang lebih luas. Koordinasi difasilitasi melalui musyawarah, yang memungkinkan aktor terkait bertukar informasi, mempertimbangkan keadaan insiden, dan menentukan respons yang tepat secara kolektif. Pendekatan kolaboratif ini mendukung pengambilan keputusan yang sensitif terhadap konteks, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada komunikasi dan koordinasi antar individu yang terlibat.

Siswa juga berkontribusi pada pencegahan melalui pengawasan informal dari teman sebaya, terutama siswa senior yang diharapkan memberikan contoh positif, mendukung siswa tingkat tiga, dan mencegah perilaku yang tidak pantas. Keterlibatan mereka menciptakan lapisan kontrol sosial tambahan dalam komunitas pesantren. Namun, tanggung jawab ini belum sepenuhnya diinstitusikan melalui kerangka anti-perundungan khusus, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kesadaran individu dan kesediaan untuk campur tangan.

Responsivitas institusional merupakan komponen penting lain dari sistem tata kelola yang ada. Laporan masalah interpersonal umumnya mengarah pada klarifikasi, dialog, dan bimbingan yang tepat, dengan kasus yang lebih serius berpotensi dirujuk ke personel konseling atau urusan mahasiswa. Namun demikian, proses pelaporan tetap sangat bergantung pada kesediaan mahasiswa untuk mendekati pelaku institusi yang terpercaya. Ketiadaan mekanisme pelaporan khusus dan rahasia dapat membatasi visibilitas insiden yang enggan diungkapkan oleh mahasiswa.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i beroperasi melalui sistem tata kelola multi-aktor dan berlapis. Peraturan siswa dan catatan disiplin menetapkan batasan perilaku, kepemimpinan pesantren memberikan arahan normatif, musyrif melakukan pengawasan harian dan deteksi dini, asatidz memperkuat nilai moral, personel konseling memberikan dukungan, staf urusan mahasiswa memfasilitasi manajemen kasus, dan siswa senior berkontribusi pada regulasi informal dari sebaya. Mekanisme-mekanisme ini menghubungkan pencegahan, identifikasi, pelaporan, bimbingan, koordinasi, dan tindak lanjut dalam kehidupan sehari-hari pesantren. Namun, integrasi praktik-praktik ini ke dalam kerangka tata kelola anti-perundungan yang spesifik, standar, dan jelas masih belum lengkap.

Faktor Institusional, Budaya, dan Struktural yang Membentuk Pencegahan Perundungan Berbasis Tata Kelola

Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i dibentuk oleh interaksi faktor institusional, budaya, dan struktural. Faktor-faktor ini memengaruhi seberapa efektif mekanisme pencegahan diterapkan dan bagaimana perilaku berbahaya secara konsisten diidentifikasi dan ditangani. Faktor

pendukung utama meliputi otoritas moral kepemimpinan pesantren, hubungan erat antara musyrif dan siswa, internalisasi adab, praktik musyawarah, dan responsivitas pelaku institusional. Sementara itu, kendala penting meliputi kapasitas pengawasan yang terbatas, ketergantungan pada personel individu, tidak adanya kebijakan anti-perundungan khusus, prosedur pelaporan yang tidak jelas, normalisasi perilaku berbahaya, dan kekhawatiran siswa tentang konsekuensi sosial dari pelaporan insiden.

Di tingkat institusi, kepemimpinan pesantren menyediakan fondasi penting untuk pencegahan perundungan melalui penetapan ekspektasi perilaku dan bimbingan moral. Penekanan pada adab, saling menghormati, komunikasi yang tepat, dan larangan perilaku berbahaya memberikan kerangka normatif bersama bagi pelaku institusional dan mahasiswa. Harapan ini diperkuat melalui pengawasan asrama, kegiatan pendidikan, konseling, dan praktik administrasi. Otoritas moral kepemimpinan dengan demikian berkontribusi dalam menjaga lingkungan institusional di mana hubungan yang saling menghormati diakui sebagai komponen penting dalam pengembangan mahasiswa.

Namun, pelaksanaan langkah-langkah pencegahan masih sebagian bergantung pada komitmen dan keterlibatan para pemimpin dan pengasuh individu. Ketika harapan institusional terutama dikomunikasikan melalui otoritas pribadi daripada prosedur tertulis yang rinci, konsistensi pelaksanaan dapat bervariasi sesuai inisiatif dan praktik kepemimpinan masing-masing. Meskipun pesantren memiliki fondasi normatif yang kuat, fondasi ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam sistem standar yang memastikan implementasi yang konsisten di berbagai lingkungan institusi.

Kedekatan hubungan antara musyrif dan mahasiswa merupakan faktor pendukung penting lainnya. Kehadiran mereka sehari-hari di asrama memungkinkan mereka mengamati perubahan perilaku siswa, kondisi emosional, partisipasi, dan hubungan dengan teman sebaya. Kedekatan ini sangat penting dalam mengidentifikasi bentuk perundungan yang tidak langsung terlihat, termasuk ejekan, eksklusi sosial, intimidasi, dan tekanan yang muncul dari hubungan sebaya-kelompok. Deteksi dini sangat bergantung pada kemampuan musyrif untuk mengenali perubahan perilaku siswa dan menjaga komunikasi terbuka dengan mereka yang berada di bawah pengawasan mereka.

Namun demikian, efektivitas supervisi relasional dibatasi oleh ketersediaan dan beban kerja musyrif. Personel pengawas yang terbatas dan tanggung jawab yang bersaing membuat sulit untuk memantau semua mahasiswa dan ruang asrama secara terus-menerus. Keterbatasan ini sangat signifikan dalam lingkungan informal di mana mahasiswa berinteraksi dengan pengawasan yang kurang langsung. Oleh karena itu, meskipun kedekatan relasional memberikan keuntungan pencegahan yang penting, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada ketersediaan staf, perhatian, dan distribusi tanggung jawab pengawasan.

Lingkungan budaya pesantren juga menyediakan sumber daya penting untuk pencegahan. Internalisasi adab, rasa hormat, tanggung jawab moral, dan harmoni kolektif menetapkan harapan perilaku yang mencegah siswa mempermalukan atau menyakiti orang

lain. Nilai-nilai ini diperkuat melalui pengajaran formal dan interaksi sehari-hari, memungkinkan pencegahan perundungan menjadi bagian dari proses pendidikan moral dan karakter yang lebih luas. Praktik musyawarah semakin mendukung pencegahan dengan memfasilitasi pertimbangan kolektif terhadap masalah interpersonal dan mendorong koordinasi antara musyrif, tenaga konseling, dan staf urusan mahasiswa.

Meskipun memiliki kekuatan budaya ini, norma sebaya tertentu dapat mempersulit identifikasi perundungan. Ejekan verbal, julukan menghina, dan komentar yang tidak nyaman dapat dianggap sebagai lelucon biasa, bahkan ketika menyebabkan tekanan emosional atau penghinaan. Normalisasi ini menciptakan ketidakpastian mengenai batasan antara interaksi yang dapat diterima dan perilaku berbahaya. Ketika siswa merasa bahwa melaporkan suatu insiden dapat menyebabkan mereka dilabeli terlalu sensitif, mereka mungkin kurang bersedia mencari bantuan institusional. Persepsi semacam ini dapat menunda intervensi dan memungkinkan perilaku berbahaya berlanjut tanpa pengakuan resmi.

Hubungan senioritas menghadirkan tantangan serupa. Siswa senior dapat berkontribusi positif dalam pencegahan dengan membimbing siswa junior, memodelkan perilaku yang tepat, dan campur tangan ketika interaksi teman sebaya menjadi berlebihan. Namun, perbedaan posisi sosial juga dapat menciptakan hubungan yang tidak setara di mana instruksi, teguran, atau harapan yang diberlakukan oleh siswa senior dianggap sebagai intimidasi. Potensi pencegahan dari supervisi sebaya bergantung pada batasan perilaku yang jelas dan bimbingan institusional yang membedakan kepemimpinan bertanggung jawab dari penyalahgunaan otoritas sosial.

Kendala signifikan lainnya adalah tidak adanya kebijakan anti-perundungan tertulis yang spesifik. Meskipun peraturan yang ada melarang perilaku yang merugikan dan tidak menghormati, peraturan tersebut tidak memberikan definisi operasional yang komprehensif tentang perundungan atau menetapkan prosedur rinci untuk pencegahan, pelaporan, investigasi, intervensi, dan tindak lanjut. Akibatnya, klasifikasi insiden dapat bergantung pada penilaian dan pengalaman pelaku institusional secara individual. Perilaku yang diakui sebagai perundungan oleh satu orang dapat diartikan sebagai konflik biasa atau lelucon yang tidak pantas oleh orang lain, yang berpotensi menghasilkan respons yang tidak konsisten.

Ketiadaan prosedur khusus juga memengaruhi kejelasan tanggung jawab institusional. Meskipun musyrif, asatidz, staf konseling, staf urusan mahasiswa, dan pemimpin pesantren berkontribusi pada pencegahan perundungan, tanggung jawab mereka dalam menangani kasus perundungan belum sepenuhnya ditetapkan melalui kerangka kelembagaan yang terstandarisasi. Komunikasi informal dan musyawarah membantu menjembatani kesenjangan ini, tetapi ketiadaan jalur yang jelas dapat menimbulkan variasi dalam manajemen kasus dan tindak lanjut.

Mekanisme pelaporan lebih lanjut menggambarkan hubungan antara kekuatan dan keterbatasan institusi. Mahasiswa memiliki akses ke personel musyrif dan institusi lainnya, dan masalah yang dilaporkan umumnya mendapat perhatian. Namun, ketersediaan orang

dewasa yang dipercaya tidak selalu menjamin bahwa mahasiswa merasa cukup aman untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Ketakutan akan eksklusi sosial, reaksi negatif dari teman sebaya, dan dianggap terlalu sensitif dapat membuat mahasiswa enggan melaporkan insiden. Kekhawatiran ini sangat relevan di lingkungan residensial di mana mahasiswa terus berbagi ruang tinggal dan menjaga hubungan dengan individu yang terlibat setelah insiden ditangani.

Situasi ini menyoroti perbedaan antara responsivitas institusional dan keamanan psikologis dalam pelaporan. Meskipun personel institusi dapat merespons ketika masalah diungkapkan, efektivitas sistem pelaporan tetap bergantung pada kepercayaan mahasiswa terhadap pengasuh individu dan kesediaan mereka untuk mengkomunikasikan pengalaman sensitif. Tanpa mekanisme pelaporan rahasia yang jelas, insiden yang sulit diamati atau yang enggan diungkapkan oleh mahasiswa mungkin tetap berada di luar proses respons formal institusi.

Penekanan pesantren pada bimbingan, dialog, dan pemulihan hubungan juga memengaruhi cara kasus perundungan dikelola. Pendekatan ini mendukung perkembangan moral dan berupaya mencegah terulangnya perilaku berbahaya tanpa hanya bergantung pada tindakan hukuman. Namun, efektivitas intervensi semacam ini bergantung pada kemampuan pelaku institusional untuk membedakan perselisihan interpersonal biasa dari perilaku berulang atau tidak setara yang menyebabkan kerugian psikologis atau sosial. Ketika perilaku berbahaya diperlakukan hanya sebagai lelucon atau konflik kecil, respons mungkin tidak cukup mencerminkan keseriusan pengalaman siswa.

Secara keseluruhan, pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i didukung oleh sumber daya institusional dan budaya yang kuat, termasuk kepemimpinan moral, pengawasan relasional, internalisasi adab, pengambilan keputusan kolektif, dan responsivitas terhadap kekhawatiran siswa. Sumber daya ini menyediakan dasar untuk mengidentifikasi masalah, membimbing perilaku siswa, dan menjaga ketertiban sosial di dalam pesantren. Namun demikian, efektivitasnya terbatas oleh kapasitas pengawasan yang terbatas, ketergantungan pada inisiatif individu, tidak adanya kebijakan operasional spesifik, tanggung jawab institusional yang tidak jelas, prosedur pelaporan informal, dan norma sebaya yang dapat menormalkan perilaku berbahaya.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa faktor pendukung dan pembatas ini saling terkait. Kepemimpinan moral memperkuat nilai pencegahan tetapi juga dapat menghasilkan ketergantungan pada otoritas individu. Supervisi relasional memfasilitasi deteksi dini tetapi rentan terhadap keterbatasan staf. Siswa senior dapat mendukung teman sebaya yang lebih muda tetapi juga dapat menggunakan kekuatan sosial yang tidak setara. Pelaporan informal memungkinkan akses langsung ke pengasuh tetapi tidak selalu menjamin kerahasiaan atau keamanan psikologis. Demikian pula, penekanan pada harmoni kolektif dan rekonsiliasi dapat mendukung penyelesaian konflik yang konstruktif sekaligus berpotensi membuat perilaku berbahaya lebih sulit dikenali.

Oleh karena itu, pencegahan perundungan berbasis tata kelola di Pondok Pesantren Imam Syafi'i ditandai dengan kapasitas relasional dan budaya yang kuat serta formalisasi institusional dan prosedural yang belum lengkap. Memperkuat sistem yang ada membutuhkan kejelasan lebih dalam mendefinisikan perundungan, menetapkan prosedur pelaporan dan manajemen kasus yang standar, memperjelas tanggung jawab pelaku institusional, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan menumbuhkan budaya sebaya yang mengakui perbedaan antara lelucon yang dapat diterima dan perilaku yang menyebabkan kerugian. Langkah-langkah ini akan membantu menghubungkan kekuatan moral dan relasional pesantren yang sudah ada dengan kerangka kelembagaan yang lebih konsisten dan akuntabel untuk pencegahan perundungan.

Pembahasan

Mekanisme Tata Kelola yang Diterapkan oleh Aktor Institusional untuk Pencegahan Perundungan

Temuan menunjukkan bahwa pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i beroperasi melalui sistem tata kelola yang tertanam dan multi-aktor, bukan melalui program anti-perundungan yang berdiri sendiri. Pencegahan diintegrasikan ke dalam regulasi siswa, pengawasan asrama, pendidikan moral, konseling, keterlibatan teman sebaya, rujukan kasus, dan pengambilan keputusan kolektif. Temuan ini penting karena menggeser interpretasi pencegahan perundungan dari intervensi perilaku yang terpisah menuju proses institusional yang melibatkan aturan, hubungan, tanggung jawab, dan praktik organisasi sehari-hari. Interpretasi semacam ini konsisten dengan bukti kontemporer yang menunjukkan bahwa pencegahan perundungan yang efektif cenderung membutuhkan pendekatan seluruh sekolah daripada mengandalkan satu komponen intervensi saja. Gaffney et al. (2021), misalnya, menemukan bahwa komponen yang beroperasi di sekolah, kelas, guru, orang tua, teman sebaya, dan individu terkait dengan hasil anti-perundungan, sementara Fraguas et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi anti-perundungan berbasis sekolah dapat menghasilkan pengurangan perundungan yang terukur dan peningkatan kesehatan mental anak muda.[25] Studi ini memperluas perspektif ini ke dalam konteks Pondok Pesantren, di mana tata kelola institusional juga menggabungkan pengawasan residensial, norma agama, otoritas moral, dan interaksi berkelanjutan antara siswa dan pengasuh.

Keberadaan peraturan siswa merupakan fondasi formal dari pengaturan tata kelola ini. Meskipun peraturan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i tidak secara eksplisit mengidentifikasi perundungan sebagai kategori pelanggaran independen, peraturan tersebut melarang perilaku seperti menyakiti, menghina, mempermalukan, dan merendahkan siswa lain.

[25] Gaffney, Ttofi, dan Farrington, "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif"; Fraguas et al., "Penilaian Intervensi Anti-Perundungan di Sekolah: Meta-Analisis Uji Klinis Acak"; Yan Y Supriatman, "Sistem Kerja Otak Manusia Dalam Pendekatan Psikologi Dan Kajian Ilmu Al-Qur'An," *Rahmad* 2, No. 1 (2024): 1–13, https://doi.org/10.71349/rahmad.v2i1.11.

Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan sudah diakui secara institusional pada tingkat substansial, tetapi artikulasi formalnya tetap tertanam dalam aturan disiplin umum. Dari perspektif tata kelola, pengaturan ini merupakan bentuk pencegahan berbasis aturan yang penting namun belum lengkap: batasan perilaku ada, tetapi definisi operasional perundungan dan prosedur yang melekat secara khusus tetap kurang eksplisit. Perbedaan ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan anti-perundungan saja tidak selalu menghasilkan intervensi staf yang konsisten. Waasdorp et al. (2021) menemukan bahwa keberadaan kebijakan terkait perundungan terkait dengan efektivitas mandiri staf yang lebih besar, tetapi kehadiran kebijakan itu sendiri tidak otomatis berhubungan dengan respons perilaku yang lebih kuat; staf yang menerima pelatihan terkait kebijakan lebih mungkin untuk campur tangan, berkonsultasi dengan rekan kerja, dan merujuk mahasiswa untuk dukungan khusus.[26] Dengan demikian, temuan Imam Syafi'i memperkuat argumen bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada bagaimana pelaku kelembagaan memahami dan mengoperasionalkan aturan tersebut.

Interpretasi ini didukung lebih lanjut oleh Pearce et al. (2024), yang mengidentifikasi kepemimpinan yang berkomitmen, struktur dan proses organisasi, kompetensi staf, serta penerjemahan bukti ke dalam kebijakan dan praktik lokal sebagai pendorong utama kualitas dalam pencegahan perundungan di seluruh sekolah.[27] Temuan di Imam Syafi'i mengungkapkan proses penerjemahan kebijakan yang sebanding, meskipun terjadi dalam lingkungan tata kelola yang khas secara budaya. Aturan umum yang melarang perilaku berbahaya diterjemahkan ke dalam pencegahan sehari-hari melalui orientasi siswa, pengingat moral berulang, pengawasan, konseling, dan bimbingan disipliner. Ini berarti mekanisme regulasi tidak terbatas pada dokumen tertulis; aturan memperoleh makna preventif melalui praktik aktor institusional. Temuan ini oleh karena itu menunjukkan adanya perbedaan antara keberadaan kebijakan formal dan tata kelola yang diberlakukan. Dalam konteks pesantren, aturan menjadi operasional ketika terus-menerus direproduksi melalui interaksi antara pemimpin, musyrif, asatidz, staf konseling, dan siswa.[28]

Sentralitas musyrif merupakan salah satu temuan paling khas dari studi ini. Berbeda dengan lingkungan sekolah harian konvensional, di mana kontak guru–siswa sebagian besar terkonsentrasi dalam kegiatan akademik terjadwal, tata kelola Pondok Pesantren meluas ke kehidupan residensial dan informal siswa. Di Imam Syafi'i, musyrif berfungsi secara bersamaan sebagai pengawas, pengasuh, pengamat, mediator, dan titik kontak pertama ketika muncul kesulitan interpersonal. Kemampuan mereka untuk mengenali keterasingan, eksklusi, perubahan emosional, dan pergeseran hubungan teman sebaya berarti pencegahan perundungan sebagian bergantung pada pengetahuan relasional, bukan hanya pengawasan

[26] Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan."
[27] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."
[28] Rexhep Suma, "Identitas Nasional Kosovo dan Pengaruh Media Keagamaan Melalui Komunikasi Antarbudaya," *Jurnal Manajemen Sosial dan Lingkungan* 18, no. 9 (2024), https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-145.

formal. Temuan ini sangat relevan untuk pendidikan asrama karena lingkungan sosial dan institusional siswa secara substansial tumpang tindih. Penelitian yang melibatkan siswa asrama juga menunjukkan bahwa perundungan di sekolah sangat terkait dengan persepsi siswa tentang keselamatan emosional dan fisik, sementara bukti terbaru menunjukkan bahwa rasa memiliki di sekolah dan hubungan yang mendukung antara siswa sangat penting bagi kesejahteraan siswa yang tinggal di lingkungan asrama.[29]

Peran musyrif dengan demikian menggambarkan apa yang dapat disebut sebagai tata kelola relasional. Pencegahan terjadi bukan hanya karena orang dewasa menduduki posisi pengawasan, tetapi karena interaksi yang berkelanjutan menghasilkan pengetahuan tentang siswa dan hubungan mereka. Kedekatan relasional semacam ini sangat penting untuk mengidentifikasi perundungan verbal dan relasional, yang mungkin kurang terlihat dibandingkan agresi fisik. Dalam data empiris, perundungan sering muncul melalui ejekan, julukan merendahkan, eksklusi, tekanan kelompok, dan hubungan senior–junior yang tidak setara. Bentuk interaksi ini memerlukan interpretasi karena perilaku yang sama dapat dipahami berbeda oleh orang yang melakukannya, penerima, dan orang dewasa yang mengamatinya. Bukti Indonesia memperkuat kompleksitas kontekstual ini. Fine et al. (2023) menemukan bahwa remaja di Semarang sering membedakan antara lelucon biasa dan perundungan berdasarkan pengulangan, tingkat keparahan, dan apakah perilaku tersebut dianggap telah melewati batas antarpersonal. [30] Oleh karena itu, tata kelola yang efektif tidak dapat bergantung sepenuhnya pada identifikasi insiden yang jelas; hal ini juga membutuhkan aktor kelembagaan yang mampu menafsirkan konteks relasional di mana perilaku terjadi.

Temuan penting lainnya berkaitan dengan penggunaan bimbingan pribadi dan konseling daripada respons hukuman langsung. Di Imam Syafi'i, mahasiswa yang terlibat dalam perilaku yang berpotensi berbahaya umumnya didekati melalui dialog, nasihat, konseling, dan koreksi moral, sementara siswa yang mengalami perilaku tersebut dapat menerima pendampingan dan dukungan. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi institusional memiliki tujuan korektif dan pencegahan. Tujuannya bukan hanya untuk mengakhiri insiden tertentu tetapi untuk memengaruhi pemahaman siswa tentang tanggung jawab interpersonal dan mengurangi kemungkinan pengulangan. Hal ini kompatibel dengan bukti yang lebih luas yang menunjukkan bahwa intervensi anti-perundungan yang efektif biasanya melibatkan lebih dari sekadar sanksi. Gaffney et al. (2021) mengidentifikasi komponen seperti aturan kelas, keterlibatan informal teman sebaya, dan kerja dengan siswa yang terdampak perundungan di antara elemen-elemen yang terkait dengan hasil intervensi yang lebih kuat.[31] Demikian pula, meta-analisis oleh Fraguas et al. (2021), yang mencakup 69

[29] R Li et al., "Studi Empiris tentang Efektivitas Penilaian Formatif yang Dikuatkan AI dalam Kursus Universitas," dalam *Batas dalam Kecerdasan Buatan dan Aplikasi*, ed. Tallon-Ballesteros A.J. dan Correia L., vol. 417 (Sekolah Militer dan Politik, National University of Defense Technology, Hunan, China: IOS Press BV, 2026), 410–18, https://doi.org/10.3233/FAIA251684.

[30] Fine et al., "'Jika Benar-benar Berlebihan, Bisa Masuk ke Hati Anda': Penelitian Metode Campuran tentang Perundungan di Remaja Dini di Semarang, Indonesia."

[31] Gaffney, Ttofi, dan Farrington, "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif."

uji coba acak independen dan lebih dari 111.000 peserta, mendukung nilai yang lebih luas dari intervensi komprehensif berbasis sekolah daripada respons disipliner yang terisolasi.[32]

Namun, kontribusi kasus Imam Syafi'i bukan sekadar adanya banyak intervensi. Yang lebih penting, mekanisme ini diorganisir melalui budaya pendidikan dan moral pesantren. Konseling dan koreksi perilaku terkait dengan akhlaq, adab, dan harapan bahwa siswa belajar menjaga hubungan sosial yang tepat.[33] Penembusan budaya ini membedakan mekanisme dari model intervensi yang terutama mengandalkan komponen program teknis. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dan moral berfungsi sebagai sumber daya tata kelola karena menyediakan bahasa yang sah secara lokal untuk menantang perilaku berbahaya. Pada saat yang sama, sumber daya budaya ini tidak menggantikan struktur institusional; melainkan beroperasi berdampingan dengan aturan, pengawasan, konseling, dan manajemen kasus. Mekanisme yang diamati pada Imam Syafi'i oleh karena itu lebih baik dipahami sebagai interaksi antara regulasi normatif dan pelaksanaan relasional.

Karakter multi-aktor dalam pencegahan memberikan titik konvergensi penting lainnya dengan penelitian internasional. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada satu aktor tunggal yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencegah perundungan. Pemimpin pesantren menetapkan arah normatif, musyrif melakukan pengawasan harian dan deteksi dini, asatidz memperkuat nilai perilaku dalam kegiatan pendidikan, personel konseling memberikan dukungan khusus, personel urusan siswa berpartisipasi dalam eskalasi kasus, dan siswa senior melakukan kontrol informal dari teman sebaya. Pengaturan terdistribusi ini mirip dengan logika seluruh sekolah yang diidentifikasi oleh Gaffney et al. (2021), di mana pencegahan efektif dapat melibatkan beberapa tingkat ekologi, bukan satu profesional yang bertanggung jawab.[34] Pearce et al. (2024) juga menemukan bahwa kapasitas pelaksanaan lebih kuat ketika pencegahan perundungan tertanam dalam struktur organisasi dan ketika tim implementasi memiliki otoritas dan koneksi yang cukup dengan pimpinan sekolah.[35]

Signifikansi empiris dari pengaturan multi-aktor ini terletak pada cara tanggung jawab institusional terhubung melalui musyawarah. Kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat asrama dapat melibatkan musyrif, personel konseling, staf urusan mahasiswa, dan administrator lain dalam musyawarah kolektif. Mekanisme ini menciptakan bentuk akuntabilitas internal di mana keputusan tidak dibuat secara eksklusif oleh orang pertama yang menerima laporan. Sebaliknya, informasi disebarluaskan di antara aktor terkait dan respons dinegosiasikan secara kolektif. Koordinasi semacam ini beresonansi dengan Waasdorp et al. (2021), yang menemukan bahwa persiapan staf terkait kebijakan perundungan meningkatkan kemungkinan staf membahas insiden dengan rekan kerja dan

[32] Fraguas et al., "Penilaian Intervensi Anti-Perundungan di Sekolah: Meta-Analisis Uji Klinis Acak."
[33] C Weston et al., "Pengaruh Peserta dalam Evaluasi Formatif terhadap Peningkatan Pembelajaran dari Materi Pengajaran Tertulis," *ilmu instruksional* 25, no. 5 (1997): 369–86, https://doi.org/10.1023/A:1003073923764.
[34] Gaffney, Ttofi, dan Farrington, "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif."
[35] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."

merujuk mahasiswa yang terlibat ke konselor atau psikolog.[36] Perbandingan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif sebagian dihasilkan melalui konektivitas institusional: pelaku tidak hanya harus menjalankan peran mereka sendiri tetapi juga memiliki jalur di mana informasi, tanggung jawab, dan kasus bergerak di seluruh organisasi.[37]

Namun, di Imam Syafi'i, koordinasi ini lebih bersifat relasional dan deliberatif daripada birokratis prosedural. Musyawarah memberikan fleksibilitas dan memungkinkan pelaku institusional mempertimbangkan keadaan setiap mahasiswa dan insiden daripada menerapkan respons yang seragam secara mekanis. Fleksibilitas ini mungkin sangat berharga di institusi asrama di mana mahasiswa yang terlibat dalam insiden tetap tinggal bersama setelah penanganan formal kasus. Namun demikian, temuan bahwa tanggung jawab dan jalur eskalasi belum sepenuhnya dikodifikasi menunjukkan bahwa sistem tata kelola saat ini sangat bergantung pada komunikasi interpersonal dan kompetensi pelaku institusional tertentu. Pengamatan ini mendukung argumen Pearce et al. (2024) bahwa kualitas pelaksanaan bergantung pada proses organisasi dan kapasitas staf, bukan hanya pada ketersediaan materi pencegahan atau kebijakan formal.[38]

Partisipasi siswa senior memperkenalkan lapisan tata kelola tambahan. Siswa senior di Imam Syafi'i diharapkan untuk mencontohkan perilaku yang sesuai, mengingatkan teman saat perilaku mereka menjadi berlebihan, mendukung siswa junior, dan campur tangan dalam beberapa masalah interpersonal. Bentuk partisipasi ini berarti pencegahan melampaui kontrol dewasa ke mahasiswa dan mencakup regulasi sosial tingkat sebaya. Temuan ini patut dicatat karena bukti meta-analisis mengaitkan keterlibatan informal teman sebaya dengan hasil anti-perundungan yang lebih kuat.[39] Partisipasi teman sebaya mungkin sangat penting di institusi asrama karena mahasiswa menghabiskan waktu yang cukup lama bersama di luar kehadiran orang dewasa secara langsung. Oleh karena itu, mahasiswa bukan sekadar penerima tata kelola institusional; beberapa juga bertindak sebagai agen yang mereproduksi, menegosiasikan, dan menegakkan norma perilaku dalam hubungan teman sebaya.

Namun studi ini menambahkan kualifikasi kontekstual yang penting. Di pesantren, senioritas dapat berfungsi sekaligus sebagai sumber pencegahan dan sumber kekuatan sosial yang tidak setara. Siswa senior mungkin melindungi siswa yang lebih muda, tetapi hubungan sebaya yang hierarkis juga dapat menyulitkan membedakan bimbingan yang sah dari intimidasi. Temuan Indonesia yang dilaporkan oleh Fine et al. (2023) relevan di sini karena menunjukkan bahwa interpretasi remaja terhadap perundungan sangat bergantung pada

[36] Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan."

[37] Arif Mustapa et al., "Merancang Pendidikan Islam Berbasis Multikultural untuk Melawan Radikalisasi Mahasiswa di Indonesia," *Jurnal untuk Deradikalisasi*, no. 43 (2025): 93–139, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105012122483&partnerID=40&md5=6cbb08113195a90607fe7104335068bf.

[38] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."

[39] Gaffney, Ttofi, dan Farrington, "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif."

penilaian kontekstual tentang interaksi yang dapat diterima dan ketika bercanda atau perilaku teman menjadi berlebihan.[40] Oleh karena itu, partisipasi teman sebaya memerlukan pembingkaian institusional. Nilai keterlibatan siswa senior-siswa tidak hanya terletak pada memberikan tanggung jawab kepada siswa senior, tetapi juga memastikan bahwa tanggung jawab terkait dengan norma perlindungan, pengekangan, dan penghormatan yang dikomunikasikan dengan jelas.[41]

Responsivitas aktor institusional terhadap laporan mahasiswa merupakan komponen penting terakhir dari mekanisme tata kelola. Temuan empiris menunjukkan bahwa keluhan yang diajukan kepada musyrif umumnya diikuti oleh tindakan yang relatif cepat, termasuk klarifikasi, menelepon mahasiswa yang terlibat, konseling, atau eskalasi ke unit lain. Responsivitas sangat penting karena keberadaan aturan menjadi bermakna hanya ketika mahasiswa dapat mengharapkan masalah yang dilaporkan menerima respons institusional. Waasdorp et al. (2021) juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat terkait dengan apa yang sebenarnya dilakukan staf ketika situasi perundungan diketahui, sementara Pearce et al. (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan bergantung pada kapasitas organisasi yang memungkinkan kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik.[42] Dalam hal ini, Imam Syafi'i menunjukkan model pelaporan yang relatif responsif namun didominasi oleh interpersonal: mahasiswa mengakses tata kelola melalui hubungan dengan musyrif dan pengasuh lainnya, bukan terutama melalui prosedur formal yang impersonal.

Konteks Pondok Pesantren memperkuat pentingnya mekanisme ini. Fredrick et al. (2021) menunjukkan bahwa perundungan di antara siswa asrama terkait dengan persepsi tentang keselamatan emosional dan fisik, sementara Liu et al. (2025) menemukan bahwa rasa memiliki di sekolah memainkan peran penting dalam hubungan antara perundungan dan hasil kesehatan mental di antara siswa asrama.[43] Studi-studi ini memperkuat interpretasi bahwa responsivitas tidak boleh dipandang semata-mata sebagai penanganan kasus administratif. Dalam lingkungan pendidikan residensial, cara pelaku institusional merespons siswa juga mengkomunikasikan apakah institusi itu sendiri dapat dipercaya sebagai sumber perlindungan. Dengan demikian, interaksi sehari-hari antara siswa dan musyrif, staf konseling, guru, dan administrator merupakan bagian dari iklim perlindungan yang lebih luas di institusi tersebut.

---

[40] Fine et al., "'Jika Benar-benar Berlebihan, Bisa Masuk ke Hati Anda': Penelitian Metode Campuran tentang Perundungan di Remaja Dini di Semarang, Indonesia."

[41] Lutfi Zulkarnain, "Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Pesantren Daar El Manshur," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 799, https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2474.

[42] Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan"; Pearce et al., "'Ini Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."

[43] Fredrick et al., "Persepsi tentang Keamanan Emosional dan Fisik di antara Siswa Asrama dan Asosiasi dengan Perundungan di Sekolah"; Liu et al., "Dampak Perundungan Sekolah terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Menengah Asrama: Peran Meditasi dari Rasa Memiliki dan Ketahanan di Sekolah."

Dilihat dari perspektif tata kelola, temuan keseluruhan mengungkapkan bentuk hibrida tata kelola pencegahan perundungan. Elemen formal terlihat melalui aturan mahasiswa, mekanisme disipliner, tanggung jawab aktor, dan eskalasi kasus, sedangkan elemen relasional dan budaya beroperasi melalui otoritas kepemimpinan pesantrain, kedekatan musyrif–mahasiswa, bimbingan moral berbasis adab, musyawarah, konseling, dan partisipasi sebaya.[44] Kontribusi utama dari studi ini bukanlah untuk berargumen bahwa tata kelola formal tidak ada, melainkan untuk menunjukkan bahwa mekanisme formal saja tidak cukup menjelaskan bagaimana pencegahan sebenarnya beroperasi di pesantren. Tata kelola dilaksanakan melalui interaksi antara struktur institusional formal dan hubungan yang tertanam secara budaya.

Temuan ini memperluas diskusi internasional tentang pencegahan perundungan di seluruh sekolah dengan dua cara. Pertama, mendukung bukti yang ada bahwa pencegahan berkelanjutan membutuhkan tindakan institusional yang terkoordinasi, bukan sanksi atau program yang terisolasi.[45] Kedua, ini menunjukkan bahwa bentuk praktis tata kelola institusi secara menyeluruh dapat berbeda di berbagai konteks pendidikan. Di Pondok Pesantren, pelaksanaan tidak terpisahkan dari perawatan residensial, otoritas moral, nilai-nilai agama, dan hubungan interpersonal yang berkelanjutan. Elemen-elemen ini tidak muncul secara mencolok dalam model arus utama yang dikembangkan di sekitar sekolah konvensional, namun tetap menjadi inti bagaimana otoritas institusional dialami dan dijalankan di dalam pesantren.

Oleh karena itu, jawaban untuk fokus penelitian pertama adalah bahwa mekanisme tata kelola untuk pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i dijalankan sebagai proses institusional berlapis yang bergerak dari penetapan norma ke supervisi, deteksi, pelaporan, bimbingan, koordinasi, dan tindak lanjut. Proses ini melibatkan banyak aktor institusional yang perannya saling melengkapi, bukan terisolasi. Regulasi tertulis menciptakan batasan perilaku; kepemimpinan melegitimasi batas-batas tersebut; musyrif menerjemahkannya ke dalam pengawasan residensial sehari-hari; asatidz memperkuatnya secara pendidikan; personel konseling memberikan intervensi individu; personel urusan mahasiswa mendukung eskalasi dan manajemen kasus; siswa senior berpartisipasi dalam pencegahan informal; dan musyawarah menghubungkan elemen-elemen ini melalui pengambilan keputusan kolektif. Signifikansi teoretis dari pola ini terletak pada menunjukkan bahwa tata kelola pencegahan perundungan dalam pesantren bukan murni administratif maupun murni budaya. Melainkan, ini adalah pengaturan tata kelola yang tertanam secara kontekstual di mana regulasi formal, pengawasan relasional, pendidikan

[44] E Rahmawati, M Asy'arie, dan S A Aryani, "PENGEMBANGAN NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ETIKA MAHASISWA MULTIKULTURAL DAN DEMOKRATIS," *Jurnal Manajemen Sosial dan Lingkungan* 18, no. 6 (2024), https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-009.

[45] A Ramli et al., "Urgensi Pendidikan Karakter Islam untuk Mengantisipasi Perilaku Perundungan di Sekolah Asrama," *At Ta Dib* 18, No. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9823.

moral, koordinasi institusional, dan partisipasi siswa saling berinteraksi untuk menghasilkan kapasitas pencegahan.[46]

Faktor Institusional, Budaya, dan Struktural yang Membentuk Pencegahan Perundungan Berbasis Tata Kelola

Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan perundungan berbasis tata kelola di Pondok Pesantren Imam Syafi'i dibentuk oleh interaksi dinamis antara kapasitas institusional, norma budaya, dan kondisi struktural. Dimensi-dimensi ini tidak dapat dipahami sebagai variabel independen karena karakteristik institusional yang sama dapat berfungsi sekaligus sebagai sumber perlindungan dan sumber kerentanan. Kepemimpinan moral yang kuat, hubungan erat antara musyrif dan siswa, institusionalisasi adab, dan praktik musyawarah memperkuat kapasitas pencegahan pesantren. Namun, kekuatan ini hidup berdampingan dengan keterbatasan sumber daya pengawasan, ketergantungan pada aktor individu, ketiadaan kebijakan anti-perundungan yang eksplisit, mekanisme pelaporan informal, dan ambiguitas budaya seputar lelucon dan senioritas. Pola ini konsisten dengan penelitian pelaksanaan yang menunjukkan bahwa pencegahan perundungan yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan intervensi tetapi juga pada kepemimpinan, struktur organisasi, kapasitas staf, sumber daya, dan kemampuan menerjemahkan prinsip pencegahan ke dalam praktik institusional lokal.[47]

Kepemimpinan merupakan fasilitator institusional signifikan pertama. Di Imam Syafi'i, otoritas kepemimpinan Mudir dan pesantren memberikan referensi normatif untuk perilaku yang tepat dan memperkuat harapan terkait adab, saling menghormati, dan hubungan interpersonal yang tidak merugikan.[48] Signifikansi temuan ini melampaui konsep konvensional tentang kepemimpinan administratif. Di dalam pesantrain, kepemimpinan juga didasarkan pada legitimasi moral, artinya instruksi institusional semakin kuat karena dianggap membawa otoritas etis dan agama. Temuan ini sesuai dengan Pearce et al. (2024), yang mengidentifikasi kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen sebagai salah satu pendorong inti pelaksanaan pencegahan perundungan berkualitas tinggi.[49] Studi longitudinal mereka lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaksanaan lebih berkelanjutan ketika kepemimpinan terkait dengan pengambilan keputusan organisasi dan didukung oleh tanggung jawab yang terdistribusi, bukan bergantung pada satu individu saja.

---

[46] E Suresman, A Faqihuddin, dan M Abdullah, "Dari Sorogan ke Pembelajaran Digital: Analisis Jaringan Literatur Sistematis Model Pembelajaran Pesantren," *Pendidikan yang Tepat* 12, No. 1 (2025), https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2580776.

[47] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."

[48] K Rajaram, "Penilaian, Rubrik Penilaian dan Umpan Balik," *Learning Intelligence: Strategi Pembelajaran Inovatif dan Digital yang Transformatif: Perspektif Rekayasa Budaya dan Sosial* (Divisi Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi, Nanyang Business School, Nanyang Technologic University, Singapura: Springer Nature, 2023), https://doi.org/10.1007/978-981-19-9201-8_9.

[49] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."

Kasus Imam Syafi'i bagaimanapun menambahkan dimensi budaya yang spesifik pada argumen ini. Kepemimpinan di pesantren tidak terbatas pada mengarahkan pelaksanaan kebijakan formal; kepemimpinan juga menyediakan kosakata moral yang memungkinkan harapan perilaku dilegitimasi. Konsep seperti adab, rasa hormat, tanggung jawab, dan perilaku teladan berfungsi seiring dengan aturan institusional formal. Dalam pengertian ini, otoritas moral dapat dipahami sebagai bentuk modal kelembagaan yang memfasilitasi kepatuhan tanpa sepenuhnya bergantung pada penegakan birokrasi. Namun keuntungan ini menghasilkan kerentanan tata kelola potensial ketika pencegahan menjadi terlalu bergantung pada otoritas pribadi atau perhatian pemimpin tertentu. Pearce et al. (2024) juga memperingatkan bahwa pelaksanaan berkelanjutan membutuhkan struktur organisasi, proses, sumber daya, dan kapasitas staf yang melampaui juara individu.[50]

Ketegangan serupa terlihat dalam peran musyrif. Hubungan yang erat dan berkelanjutan antara musyrif dan siswa merupakan salah satu sumber daya terkuat untuk pencegahan perundungan di lingkungan hunian. Karena musyrif berbagi bagian besar dari kehidupan sehari-hari dengan siswa, mereka dapat mendeteksi perubahan perilaku, penarikan sosial, pengucilan teman sebaya, dan ketidaknyamanan emosional yang mungkin tetap tak terlihat di kelas konvensional. Kedekatan relasional ini sangat signifikan di Pondok Pesantren, di mana lingkungan pendidikan, sosial, dan residensial saling tumpang tindih. Fredrick et al. (2021) menemukan bahwa perundungan di antara siswa asrama terkait dengan persepsi keselamatan emosional dan fisik, menunjukkan bahwa lingkungan Pondok Pesantren membutuhkan mekanisme pencegahan yang mampu menangani pengalaman keselamatan siswa secara lebih luas, bukan hanya perilaku di kelas.[51]

Penelitian terbaru semakin memperkuat pentingnya lingkungan relasional dalam pendidikan asrama. Liu et al. (2025), meneliti siswa di Pondok Pesantren menengah Tionghoa, menemukan bahwa rasa memiliki di sekolah memainkan peran mediasi penting dalam hubungan antara perundungan dan hasil kesehatan mental.[52] Meskipun konteks Pondok Pesantren Tionghoa berbeda secara budaya dari pesantren Indonesia, studi ini menegaskan pentingnya hubungan institusional dan rasa memiliki siswa dalam pendidikan asrama. Temuan Imam Syafi'i memperluas perspektif ini dengan mengidentifikasi musyrif sebagai pelaku institusional yang melalui siapa rasa memiliki, pengawasan, perlindungan, dan deteksi dini dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, kedekatan relasional tidak boleh diartikan hanya sebagai kedekatan antarpribadi; kedekatan ini berfungsi sebagai sumber tata kelola karena memungkinkan institusi untuk melihat masalah yang mungkin gagal ditangkap oleh sistem pemantauan formal.

Namun, efektivitas tata kelola relasional dibatasi oleh kapasitas struktural. Temuan menunjukkan bahwa peran preventif musyrif menjadi lebih lemah ketika jumlah mahasiswa

[50] Pearce et al.

[51] Fredrick et al., "Persepsi tentang Keselamatan Emosional dan Fisik di antara Siswa Asrama dan Asosiasi dengan Perundungan di Sekolah."

[52] Liu et al., "Dampak Perundungan di Sekolah terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Menengah Asrama: Peran Meditasi dari Kebersamaan dan Ketahanan Sekolah."

besar, supervisor memiliki banyak tanggung jawab, atau pemantauan berkelanjutan tidak dapat dipertahankan. Kondisi ini menunjukkan perbedaan penting antara ketersediaan relasional dan kapasitas institusional. Pesantren mungkin memiliki pengasuh yang berkomitmen, tetapi kontribusi pencegahan mereka tidak dapat diasumsikan beroperasi secara konsisten jika rasio staf dan beban kerja tidak memungkinkan kehadiran yang cukup di ruang hunian. Pearce et al. (2024) juga mengidentifikasi struktur organisasi, proses, dan sumber daya sebagai hal fundamental bagi kualitas implementasi.[53] Temuan mereka menunjukkan bahwa personel yang berkomitmen membutuhkan waktu yang cukup, dukungan organisasi, dan tanggung jawab yang terstruktur dengan jelas agar pencegahan dapat menjadi berkelanjutan.

Oleh karena itu, kendala struktural yang ditemukan pada Imam Syafi'i tidak boleh ditafsirkan hanya sebagai masalah kinerja individu di kalangan musyrif. Sebaliknya, hal ini merupakan isu organisasi mengenai bagaimana tanggung jawab pencegahan didistribusikan dan didayakan. Ketika deteksi efektif sangat bergantung pada apakah musyrif tertentu hadir, perhatian, dan tersedia, tata kelola preventif menjadi rentan terhadap variasi beban kerja dan kapasitas individu. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pencegahan perundungan berkelanjutan memerlukan institusionalisasi: kekuatan relasional harus didukung oleh pengaturan organisasi yang memastikan kontinuitas bahkan ketika pelaku tertentu tidak tersedia.[54]

Faktor budaya memberikan dimensi khas lain dari temuan tersebut. Penekanan pesantren pada adab, tanggung jawab moral, interaksi yang saling menghormati, dan musyawarah memfasilitasi pencegahan dengan menyediakan norma yang bermakna secara budaya terhadap penghinaan atau kecederaan kepada siswa lain. Nilai-nilai ini memungkinkan pencegahan perundungan diintegrasikan ke dalam misi pendidikan pesantren yang lebih luas, bukan diperlakukan sebagai program yang dipaksakan eksternal. Pearce et al. (2024) menekankan pentingnya menerjemahkan pencegahan berbasis bukti ke dalam kebijakan dan praktik sekolah lokal daripada berasumsi bahwa implementasi harus identik di berbagai konteks institusional. Studi ini memberikan contoh terjemahan kontekstual tersebut: pencegahan perundungan diartikulasikan melalui praktik institusional dan konsep moral yang sudah tertanam dalam kehidupan pesantren.

Praktik musyawarah lebih lanjut menunjukkan bagaimana norma budaya dapat memperoleh fungsi tata kelola institusional. Diskusi kolektif di antara musyrif, personel konseling, staf urusan mahasiswa, dan administrator memungkinkan kasus dipertimbangkan dari berbagai perspektif sebelum intervensi ditentukan. Dalam istilah tata kelola, praktik ini mendukung tanggung jawab kolektif dan mengurangi kemungkinan penanganan kasus sepenuhnya berada pada satu pihak saja. Ini juga memungkinkan pertimbangan kontekstual

[53] Pearce et al., "'Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan."
[54] Da et al., "Apakah Prevalensi Perundungan Sekolah Tradisional Meningkat setelah COVID-19? Bukti dari Studi Dua Tahap Cross-Sectional sebelum dan selama Pandemi COVID-19."

terhadap mahasiswa yang terlibat, hubungan mereka, dan keadaan insiden. Kontribusi kasus Imam Syafi'i adalah menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi tidak harus muncul secara eksklusif melalui prosedur birokrasi formal; praktik institusional yang tertanam secara budaya juga dapat mengoordinasikan tanggung jawab.

Namun demikian, sumber daya budaya tidak secara inheren bersifat protektif. Salah satu temuan terpenting berkaitan dengan normalisasi ejekan dan ejekan sebagai lelucon biasa. Temuan ini sangat sesuai dengan Fine et al. (2023), yang menyelidiki perundungan pada remaja awal di Semarang, Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa remaja Indonesia membedakan antara bercanda dan perundungan sebagian berdasarkan tingkat keparahan, pengulangan, dampak emosional, dan apakah perilaku interpersonal dianggap telah melampaui batas yang dapat diterima secara sosial. Kesamaan antara temuan ini dan dari Imam Syafi'i menunjukkan bahwa pengakuan perundungan itu sendiri dimediasi secara budaya: perilaku yang dialami sebagai berbahaya oleh satu siswa dapat diartikan sebagai interaksi teman sebaya biasa oleh yang lain.

Ambiguitas ini memiliki implikasi penting dalam tata kelola. Pencegahan institusional tidak dapat berfungsi secara efektif jika perilaku berbahaya tidak diakui sebagai sesuatu yang memerlukan intervensi. Ketika penghinaan verbal, godaan yang terus-menerus, atau pengecualian dinormalisasi sebagai humor, insiden mungkin tetap berada dalam hubungan teman sebaya dan tidak pernah masuk ke mekanisme pelaporan formal atau informal. Cameron et al. (2021) juga menemukan bahwa siswa terkadang ragu apakah pengalaman sosial negatif mereka harus dipahami sebagai perundungan. Studi mereka juga menunjukkan bahwa siswa yang tidak mencari bantuan terkadang menahan diri karena takut pengungkapan akan memperburuk situasi.[55]

Senioritas memperkenalkan ketegangan budaya terkait. Di dalam pesantren, siswa senior dapat menjadi panutan dan pelindung informal bagi siswa yang lebih muda, sehingga memperkuat pencegahan di tingkat sebaya. Namun, struktur senior–junior yang sama dapat menghasilkan kekuatan yang tidak setara ketika nasihat, instruksi, atau koreksi menjadi menakutkan. Fungsi ganda ini berarti senioritas tidak dapat diklasifikasikan hanya sebagai faktor perlindungan atau risiko. Dampaknya bergantung pada bagaimana norma institusional mengatur pelaksanaan otoritas sebaya. Temuan ini berkontribusi pada literatur tata kelola dengan menggambarkan bahwa struktur budaya dapat secara fungsional ambivalen: mekanisme yang sama yang memfasilitasi pengawasan sebaya juga dapat mereproduksi asimetri kekuasaan yang memungkinkan perundungan.

Ketiadaan kebijakan anti-perundungan yang eksplisit merupakan kendala institusional yang lebih formal. Regulasi pesantren yang ada sudah melarang perilaku yang secara substansial tumpang tindih dengan perundungan, namun ketiadaan definisi operasional dan prosedur khusus membuat interpretasi sebagian besar menjadi milik pengasuh individu.

[55] David L Cameron, Ida E Stray, dan Liv L Skreland, "Deskripsi Tertulis Siswa Sekolah Menengah Pertama tentang Pengalaman Mereka dengan Perundungan dan Kecenderungan untuk Mencari Bantuan," *Jurnal Internasional Remaja dan Pemuda* 26, No. 1 (2021): 487–500, https://doi.org/10.1080/02673843.2021.2001348.

Temuan ini konsisten dengan Waasdorp et al. (2021), yang studinya terhadap 8.668 staf di 156 sekolah menunjukkan bahwa hanya memiliki kebijakan terkait perundungan dikaitkan dengan efikasi diri staf yang lebih tinggi tetapi tidak otomatis menghasilkan respons perilaku yang lebih kuat. Temuan mereka secara khusus menekankan pentingnya pelatihan terkait kebijakan dan kapasitas staf dalam menentukan bagaimana orang dewasa merespons situasi perundungan.[56]

Implikasinya bukan bahwa Imam Syafi'i hanya perlu menambahkan istilah bullying ke dalam peraturan tertulisnya. Persyaratan yang lebih penting adalah menghubungkan definisi, identifikasi, tanggung jawab, pelaporan, rujukan, intervensi, dokumentasi, dan tindak lanjut dalam mekanisme kelembagaan yang koheren. Kebijakan eksplisit menjadi bermakna hanya ketika para pelaku tahu cara menerapkannya. Dengan demikian, kelemahan yang diidentifikasi dalam studi ini berkaitan dengan integrasi kebijakan, bukan hanya ketiadaan kebijakan. Pesantren sudah memiliki beberapa komponen pencegahan, tetapi komponen-komponen tersebut masih sebagian terfragmentasi. Interpretasi ini konsisten dengan bukti pelaksanaan yang lebih luas bahwa aturan formal mengharuskan struktur organisasi dan aktor yang kompeten untuk menjadi operasional.

Fragmentasi ini sangat terlihat dalam pelaporan. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki saluran pelaporan interpersonal yang relatif mudah diakses, terutama melalui musyrif, dan pelaku institusional umumnya merespons ketika kasus diketahui. Namun, beberapa mahasiswa tetap enggan melaporkan karena takut dikecualikan, diberi label terlalu sensitif, atau mengalami kesulitan sosial lebih lanjut. Perbedaan antara ketersediaan saluran pelaporan dan keamanan pelaporan yang dirasakan ini sangat penting untuk memahami efektivitas pencegahan berbasis tata kelola.

Temuan internasional sangat mendukung interpretasi ini. Gizzarelli et al. (2023), dalam tinjauan lingkup respons staf sekolah terhadap laporan bullying oleh siswa, mencatat bahwa beberapa siswa menghindari melaporkan karena kurang percaya bahwa staf akan melakukan intervensi secara efektif.[57] Cameron et al. (2021) juga menemukan bahwa ketakutan akan memperburuk situasi berkontribusi pada keputusan siswa untuk tidak mencari bantuan. Bersama-sama, studi-studi ini menunjukkan bahwa pelaporan bukan sekadar masalah prosedural; siswa menilai konsekuensi sosial dan institusional yang diperkirakan sebelum memutuskan apakah akan mengungkapkan perundungan.[58]

Temuan Imam Syafi'i menambah dimensi residensial yang penting pada masalah ini. Siswa yang melaporkan perundungan tidak meninggalkan lingkungan sosial di akhir hari sekolah; mereka terus berbagi asrama, rutinitas, persahabatan, dan aktivitas sehari-hari

[56] Waasdorp et al., "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan."

[57] E Gizzarelli, S Burns, dan J Francis, "Tanggapan Staf Sekolah terhadap Laporan Siswa tentang Perundungan: Tinjauan Lingkup," *Jurnal Promosi Kesehatan Australia* 34, No. 2 (2023): 508–17, https://doi.org/10.1002/hpja.680.

[58] Cameron, Stray, dan Skreland, "Deskripsi tertulis siswa sekolah menengah pertama tentang pengalaman mereka dengan perundungan dan kecenderungan untuk mencari bantuan."

dengan teman sebaya yang sama. Akibatnya, biaya pengungkapan yang dirasakan bisa sangat signifikan karena potensi pembalasan atau eksklusi sosial dapat terus berlanjut dalam kehidupan asrama. Ini membantu menjelaskan mengapa perundungan relasional dapat tetap tidak terlihat secara institusional meskipun ada pengasuh yang mudah diakses.

Nagar dan Talwar (2023) lebih lanjut menunjukkan bahwa kemauan remaja untuk mengungkapkan pengalaman teman sebaya yang merugikan meningkat ketika dukungan guru dianggap tersedia dan ketika iklim sekolah yang lebih luas mendukung.[59] Meskipun studi mereka berkaitan dengan perundungan siber, implikasinya relevan dengan temuan saat ini karena menunjukkan bahwa pengungkapan dipengaruhi oleh harapan siswa terkait dukungan orang dewasa, bukan hanya oleh mekanisme pelaporan saja. Oleh karena itu, dalam konteks pesantren, sistem pelaporan yang efektif perlu menggabungkan hubungan musyrif yang mudah diakses dengan jaminan kerahasiaan, perlindungan, tindak lanjut, dan perlindungan dari konsekuensi negatif teman sebaya yang lebih jelas.

Temuan ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai transparansi. Pesantren cenderung menangani masalah terkait perundungan secara internal dan menghindari penyebaran informasi yang tidak perlu tentang mahasiswa yang terlibat dalam kasus. Pendekatan seperti ini dapat melindungi martabat mahasiswa dan mencegah konflik sosial lebih lanjut. Namun, kerahasiaan harus dibedakan secara analitis dari ketidakjelasan institusional. Melindungi identitas mahasiswa yang terlibat kompatibel dengan prosedur yang jelas, tanggung jawab yang terdokumentasi, dan informasi transparan tentang bagaimana mahasiswa dapat mencari bantuan. Oleh karena itu, tata kelola tidak mengharuskan pengungkapan kasus individual secara publik; sebaliknya, ia membutuhkan kejelasan tentang proses kelembagaan melalui mana kasus diakui dan ditangani.

Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memiliki kapasitas relasional dan budaya yang substansial tetapi institusionalisasi prosedural yang kurang lengkap. Kepemimpinan moral, adab, musyawarah, pengawasan relasional, dan pengasuh responsif merupakan sumber daya institusional yang signifikan. Karakteristik ini memungkinkan pesantren mencegah dan merespons perundungan melalui mekanisme yang sah dalam budaya pendidikannya sendiri. Namun, efektivitas mereka tetap rentan ketika pengawasan bergantung pada ketersediaan individu, perilaku berbahaya dinormalisasi secara budaya, tanggung jawab tidak cukup standar, dan mahasiswa merasakan risiko sosial dalam pelaporan.[60]

Interaksi ini menghasilkan apa yang dapat dikonseptualisasikan sebagai pengaturan tata kelola hibrida asimetris. Ini hibrida karena regulasi formal beroperasi berdampingan dengan mekanisme relasional dan budaya; ini asimetris karena dimensi relasional-budaya

[59] P M Nagar dan V Talwar, "Peran Dukungan Guru dalam Meningkatkan Niat Remaja untuk Mengungkapkan Pengalaman Perundungan Siber kepada Guru," *Komputer & Pendidikan* 207 (2023): 104922, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104922.

[60] H Ainissyifa, Y M Nasrullah, dan N Fatonah, "MEMBERDAYAKAN OTONOMI PENDIDIKAN UNTUK MENERAPKAN KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH," *Jurnal Pendidikan Islam* 10, No. 1 (2024): 25–40, https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.35133.

saat ini lebih kuat daripada dimensi prosedural-struktural. Interpretasi ini mendorong diskusi melampaui klasifikasi sederhana pesantren sebagai memiliki atau tidak memiliki tata kelola anti-perundungan. Institusi ini sudah memiliki tata kelola preventif yang bermakna, tetapi komponen-komponennya yang berbeda berkembang secara tidak merata.

Konseptualisasi ini juga memberikan perluasan penting terhadap literatur utama pencegahan perundungan di seluruh sekolah. Pearce et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan bergantung pada kepemimpinan, struktur organisasi, kompetensi staf, sumber daya, dan adaptasi kontekstual. Kasus Imam Syafi'i mengonfirmasi dimensi-dimensi ini tetapi menunjukkan bahwa, dalam Pondok Pesantren, adaptasi kontekstual melibatkan lebih dari sekadar penyesuaian materi program. Ini membutuhkan pemahaman nilai-nilai agama, otoritas moral, pengawasan residensial, struktur senioritas, musyawarah kolektif, dan sifat berkelanjutan dari hubungan sebaya.

Kontribusi utama kedua berkaitan dengan hubungan antara perlindungan institusional dan pengalaman subjektif mahasiswa terhadap keselamatan. Keberadaan aturan, pengasuh, dan aktor responsif tidak otomatis berarti siswa mengalami sistem tata kelola sebagai sesuatu yang sepenuhnya aman. Fredrick et al. (2021) menunjukkan relevansi keamanan emosional dan fisik yang dirasakan di antara siswa asrama, sementara Liu et al. (2025) menunjukkan pentingnya rasa memiliki di sekolah bagi siswa asrama yang mengalami perundungan. Temuan saat ini memperluas argumen ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola harus dipertimbangkan dari perspektif institusional dan siswa: sebuah mekanisme tidak sepenuhnya melindungi hanya karena ada; mekanisme juga harus dipandang sebagai mudah diakses, dapat dipercaya, dan aman secara sosial oleh siswa yang diharapkan menggunakannya.

Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa tantangan utama bagi Imam Syafi'i bukanlah menggantikan mekanisme relasional dan budaya dengan model anti-perundungan birokratis yang kaku. Pendekatan semacam itu bisa mengabaikan kekuatan institusional yang sudah tertanam dalam kehidupan pesantren. Sebaliknya, bukti mendukung integrasi kekuatan yang ada dengan pengaturan struktural yang lebih jelas. Kepemimpinan moral dapat dikaitkan dengan tanggung jawab institusional yang eksplisit; kedekatan musyrif dapat didukung oleh prosedur staf dan rujukan yang memadai; musyawarah dapat diintegrasikan ke dalam proses manajemen kasus yang terdokumentasi; partisipasi siswa senior dapat dipandu oleh batasan yang lebih jelas mengenai otoritas sebaya; dan jalur pelaporan pribadi dapat dilengkapi dengan opsi yang lebih aman dan lebih rahasia.

Oleh karena itu, kondisi institusional, budaya, dan struktural yang diidentifikasi dalam studi ini harus dipahami sebagai ekologi tata kelola yang saling terhubung. Kepemimpinan memberikan legitimasi, hubungan memberikan visibilitas, budaya memberikan makna perilaku, sumber daya organisasi menyediakan kapasitas implementasi, kebijakan memberikan konsistensi, dan pelaporan yang aman memberikan akses institusional. Kelemahan dalam satu dimensi dapat mengurangi efektivitas dimensi lain. Kepemimpinan yang kuat tidak dapat mengimbangi kapasitas pengawasan yang tidak memadai tanpa batas

waktu; hubungan mutif yang erat tidak dapat mendeteksi kasus yang secara aktif disembunyikan mahasiswa; aturan formal tidak dapat mencegah perilaku yang makna buruknya dinormalisasi secara budaya; dan respons institusional yang cepat tidak dapat melindungi mahasiswa yang merasa tidak cukup aman untuk melapor.

Kontribusi utama dari temuan ini adalah bahwa pencegahan perundungan berbasis tata kelola di Pondok Pesantren paling baik dipahami bukan sebagai adanya langkah anti-perundungan individu, melainkan sebagai keselarasan antara struktur institusional, legitimasi budaya, praktik relasional, dan perlindungan siswa. Imam Syafi'i menunjukkan kekuatan besar dalam tata kelola moral dan relasional, sementara kebutuhan utama perkembangan terletak pada penguatan institusionalisasi prosedural tanpa merusak sumber daya yang tertanam secara budaya ini. Keseimbangan antara responsivitas budaya dan kejelasan struktural ini memberikan wawasan utama tentang mengapa beberapa mekanisme pencegahan berfungsi efektif sementara yang lain tetap rentan dalam konteks pesantren.

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa pencegahan perundungan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i tertanam dalam sistem tata kelola multi-aktor yang mengintegrasikan regulasi institusional, pengawasan, konseling, pendidikan moral, koordinasi, dan partisipasi sebaya. Pelaksanaannya didukung oleh kepemimpinan moral, hubungan erat antara musyrif dan siswa, internalisasi adab, dan musyawarah kolektif, namun tetap terbatas oleh kapasitas pengawasan yang terbatas, ketiadaan kebijakan anti-perundungan khusus, prosedur pelaporan yang tidak jelas, normalisasi perilaku berbahaya, dan ketakutan siswa terhadap konsekuensi sosial. Temuan ini mengkonseptualisasikan pencegahan perundungan sebagai bentuk tata kelola hibrida di mana struktur institusional formal berinteraksi dengan nilai-nilai agama, norma budaya, dan praktik relasional. Oleh karena itu, penguatan pencegahan membutuhkan kerangka anti-perundungan yang eksplisit, tanggung jawab institusional yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, manajemen kasus yang terstandarisasi, serta peningkatan kapasitas pengawasan sambil mempertahankan karakter moral dan relasional kehidupan pesantren. Meskipun terbatas pada satu institusi saja, studi ini memberikan wawasan kontekstual untuk memahami pencegahan perundungan sebagai dimensi integral dari tata kelola institusi yang berkomitmen pada keselamatan, martabat, akuntabilitas, dan perlindungan mahasiswa.

Daftar Pustaka

Ainissyifa, H, Y M Nasrullah, dan N Fatonah. "MEMBERDAYAKAN OTONOMI PENDIDIKAN UNTUK MENERAPKAN KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, No. 1 (2024): 25–40. https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.35133.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Satu Ukuran untuk Semua? Apa yang Termasuk Praktik Berkualitas dalam Analisis Tematik (Refleksif)?" *Penelitian Kualitatif dalam Psikologi* 18, no. 3 (2021): 328–52. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238.

Buys, Tanya, Daleen Casteleijn, Tanya Heyns, dan H Untiedt. "Lensa Refleksif tentang Persiapan dan Melakukan Wawancara Semi-Terstruktur dengan Rekan Akademis." *Qualitative Health* Research 32, no. 13 (2022): 2030–39. https://doi.org/10.1177/10497323221130832.

Cameron, David L, Ida E Stray, dan Liv L Skreland. "Deskripsi Tertulis Siswa Sekolah Menengah Pertama tentang Pengalaman Mereka dengan Perundungan dan Kecenderungan untuk Mencari Bantuan." *International Journal of Augescence and Youth* 26, no. 1 (2021): 487–500. https://doi.org/10.1080/02673843.2021.2001348.

Campbell, Stephen, Mark Greenwood, Sarah Prior, T Shearer, K Walkem, S Young, D Bywaters, dan K Walker. "Pengambilan Sampel Tujuan: Kompleks atau Sederhana? Contoh Kasus Riset." *Journal of Research in Nursing* 25, no. 8 (2020): 652–61. https://doi.org/10.1177/1744987120927206.

Da, Q, J Huang, Z Peng, Y Chen, dan L Li. "Apakah Prevalensi Perundungan Sekolah Tradisional Meningkat Setelah COVID-19? Bukti dari Studi Dua Tahap Potong Lintas-Tahap sebelum dan selama Pandemi COVID-19." *Kekerasan & Penelantaran Anak* 143 (2023): 106256 https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106256.

Dalglish, Sarah L, H Khalid, dan S A McMahon. "Analisis Dokumen dalam Riset Kebijakan Kesehatan: Pendekatan READ." *Kebijakan dan Perencanaan Kesehatan* 35, no. 10 (2020): 1424–31. https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064.

Fine, Sarah L, A W Pinandari, S M Muzir, L Agnesia, P I Novitasari, J K Bass, R W Blum, M van Reeuwijk, S A Wilopo, dan K Mmari. "'Jika Benar-benar Berlebihan, Bisa Masuk ke Hati Anda': Investigasi Metode Campuran tentang Perundungan di Antara Remaja Dini di Semarang, Indonesia." *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 3–4 (2023): 4088–4113. https://doi.org/10.1177/08862605221111422.

Fraguas, David, C M Díaz-Caneja, M Ayora, M Durán-Cutilla, R Abregú-Crespo, I Ezquiaga-Bravo, J Martín-Babarro, dan C Arango. "Penilaian Intervensi Anti-Perundungan di Sekolah: Meta-Analisis Uji Klinis Acak." *JAMA Pediatrics* 175, no. 1 (2021): 44–55. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.3541.

Fredrick, Sarah S, A J McClemont, L N Jenkins, dan M Kern. "Persepsi tentang Keamanan Emosional dan Fisik di antara Siswa Asrama serta Asosiasi dengan Perundungan di Sekolah." *School Psychology Review* 50, no. 2–3 (2021): 441–53. https://doi.org/10.1080/2372966X.2021.1873705.

Gaffney, H, M M Ttofi, dan D P Farrington. "Apa yang Efektif dalam Program Anti-Perundungan? Analisis Komponen Intervensi yang Efektif." *Jurnal Psikologi Sekolah* 85 (2021): 37–56. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.12.002.

Gizzarelli, E, S Burns, dan J Francis. "Tanggapan Staf Sekolah terhadap Laporan Siswa tentang Perundungan: Tinjauan Lingkup." *Health Promotion Journal of Australia* 34, no. 2 (2023): 508–17. https://doi.org/10.1002/hpja.680.

Hennink, Monique, dan B N Kaiser. "Ukuran Sampel untuk Kejenuhan dalam Penelitian

Kualitatif: Tinjauan Sistematis Tes Empiris." *Social Science & Medicine* 292 (2022): 114523 https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523.

Li, R, Y Liu, N Gao, dan M Ju. "Studi Empiris tentang Efektivitas Penilaian Formatif yang Dikuatkan AI dalam Kursus Universitas." Dalam *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, disunting oleh Tallon-Ballesteros A.J. dan Correia L., 417:410–18. Sekolah Militer dan Politik, National University of Defense Technology, Hunan, China: IOS Press BV, 2026. https://doi.org/10.3233/FAIA251684.

Liu, X, L Zhang, Y Wu, Y Xin, Y Wang, dan X Su. "Dampak Perundungan di Sekolah terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Menengah Asrama: Peran Meditasi dari Kebersamaan dan Ketahanan di Sekolah." *Psikiatri Anak dan Remaja serta Kesehatan Mental* 19 (2025). https://doi.org/10.1186/s13034-025-00887-4.

Mustapa, Arif, Nur Hidayah, Tutut Chusniyah, Yusuf Hanafi, dan Apitchaya Chaiwutikornwanich. "Merancang Pendidikan Islam Berbasis Multikultural untuk Melawan Radikalisasi Mahasiswa di Indonesia." *Jurnal untuk Deradikalisasi*, no. 43 (2025): 93–139. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105012122483&partnerID=40&md5=6cbb08113195a90607fe7104335068bf.

Nagar, P M, dan V Talwar. "Peran Dukungan Guru dalam Meningkatkan Niat Remaja untuk Mengungkapkan Pengalaman Perundungan Siber kepada Guru." *Computers & Education* 207 (2023): 104922 https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104922.

Pearce, N, H Monks, N Alderman, L Hearn, S Burns, K Runions, J Francis, dan D Cross. "'Ini Semua tentang Konteks': Membangun Kapasitas Sekolah untuk Menerapkan Pendekatan Seluruh Sekolah terhadap Perundungan." *International Journal of Bullying Prevention* 6 (2024): 53–68. https://doi.org/10.1007/s42380-022-00138-6.

Pinto da Costa, M. "Mengadakan Kelompok Fokus Lintas Budaya, Multibahasa, dan Multinegara: Panduan untuk Peneliti." *International Journal of Qualitative Methods* 20 (2021): 1–6. https://doi.org/10.1177/16094069211049929.

Rahmawati, E, M Asy'arie, dan S A Aryani. "PENGEMBANGAN NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ETIKA MAHASISWA YANG MULTIKULTURAL DAN DEMOKRATIS." *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18, no. 6 (2024). https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-009.

Rajaram, K. "Penilaian, Rubrik Penilaian dan Umpan Balik." *Learning Intelligence: Strategi Pembelajaran Inovatif dan Digital yang Transformatif: Perspektif Rekayasa Budaya dan Sosial*. Divisi Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi, Nanyang Business School, Nanyang Technologic University, Singapura: Springer Nature, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9201-8_9.

Ramli, A, I Dhahri, M Solehuddin, S K M Rahmah, M Haris, dan F M Lubis. "Urgensi Pendidikan Karakter Islam untuk Mengantisipasi Perilaku Perundungan di Pondok Pesantren." *Di Ta Dib* 18, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9823.

Rogers, L G, K Shearer, S Southon Hryniuk, L Ray, dan G R Rempel. "Lebih Dari Panduan Wawancara: Pengalaman Menerapkan Pedoman Wawancara Secara Praktis dan Sadar Saat Melakukan Penelitian dengan Anak dan Remaja dengan Kondisi Kronis serta Saudara-saudara Mereka." *International Journal of Qualitative Methods* 20 (2021): 1–14. https://doi.org/10.1177/1609406920982148.

Silverio, S A, K S Sheen, A Bramante, K Knighting, T U Koops, E Montgomery, L November, dan lain-lain. "Topik Sensitif, Menantang, dan Sulit: Pengalaman dan Pertimbangan Praktis untuk Peneliti Kualitatif." *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022): 1–16. https://doi.org/10.1177/16094069221124739.

Suma, Rexhep. "Identitas Nasional Kosovo dan Pengaruh Media Agama Melalui Komunikasi Antarbudaya." *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18, no. 9 (2024). https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-145.

Supriatman, Yan Y. "Sistem Kerja Otak Manusia Dalam Pendekatan Psikologi Dan Kajian Ilmu Al-Qur'An." *Rahmad* 2, no. 1 (2024): 1–13. https://doi.org/10.71349/rahmad.v2i1.11.

Suresman, E, A Faqihuddin, dan M Abdullah. "Dari Sorogan ke Pembelajaran Digital: Analisis Jaringan Literatur Sistematis Model Pembelajaran Pesantren." *Cogent Education* 12, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2580776.

Thakkar, N, M van Geel, dan P Vedder. "Tinjauan Sistematis tentang Perundungan dan Viktimisasi di Kalangan Remaja di India." *International Journal of Bullying Prevention* 3 (2021): 253–69. https://doi.org/10.1007/s42380-020-00081-4.

Tomaszewski, L E, J Zarestky, dan E Gonzalez. "Merencanakan Riset Kualitatif: Desain dan Pengambilan Keputusan untuk Peneliti Baru." *International Journal of Qualitative Methods* 19 (2020): 1–7. https://doi.org/10.1177/1609406920967174.

Waasdorp, T E, R Fu, A L Perepezko, dan C P Bradshaw. "Peran Kebijakan Terkait Perundungan: Memahami Bagaimana Staf Sekolah Merespons Situasi Perundungan." *European Journal of Developmental Psychology* 18, no. 6 (2021): 880–95. https://doi.org/10.1080/17405629.2021.1889503.

Weston, C, C L E Maistre, L Mcalpine, dan T Bordonaro. "Pengaruh Peserta dalam Evaluasi Formatif terhadap Peningkatan Pembelajaran dari Materi Pengajaran Tertulis." *Instructional Science* 25, no. 5 (1997): 369–86. https://doi.org/10.1023/A:1003073923764.

Wihlborg, E, dan M Spante. "Untuk Kesenangan TI – Dalam Pencarian Program Pelatihan Digitalisasi yang Masuk Akal untuk Pemimpin di Sekolah dan Pra-Sekolah di Swedia." Dalam *Catatan Kuliah dalam Ilmu Komputer*, diedit oleh M R Johannessen, C Csáki, L Danneels, S Hofmann, T Lampoltshammer, P Parycek, G Schwabe, E Tambouris, dan J Ubacht, 14891 LNCS:83–98. Universitas Linköpings, Departemen Manajemen dan Teknik, Linkoping, Swedia: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70804-6_6.

Zulkarnain, Lutfi. "Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Pesantren Daar El Manshur." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022):

799. https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2474.